

Analisis Komparatif Framing Media Lokal dan Nasional pada Kasus OTT KPK di Provinsi Kalimantan Selatan

^{1**}Muhammad Ainani, ²Nur Tazkia Amalia Hamdie

^{1,2}Universitas Lambung Mangkurat

E-mail: muhammad.ainani@ulm.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan framing antara media lokal dan nasional dalam pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert M. Entman, penelitian ini menelaah empat artikel berita dari dua media lokal Kalimantan Selatan (Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin) dan dua media nasional (Kompas.com dan Media Indonesia). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam cara media lokal dan nasional membingkai kasus tersebut. Media lokal condong menyoroti dampak langsung kasus serta solusi praktis yang dapat diterapkan, sementara media nasional lebih fokus pada isu-isu struktural yang melingkupi korupsi. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dalam peliputan kasus korupsi daerah dan menunjukkan pentingnya kolaborasi antara media lokal dan nasional untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada publik. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam memahami peran media dalam membentuk opini publik terhadap isu korupsi, serta dalam pengembangan strategi pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini juga menekankan perlunya penguatan jurnalisme investigatif dan peningkatan literasi media di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: *framing media; media lokal; media nasional; korupsi daerah; operasi tangkap tangan.*

Abstract

Media coverage of corruption cases plays a crucial role in shaping public opinion and supporting efforts to combat corruption. This study aims to analyze the differences in framing between local and national media in reporting the KPK's Operation Tangkap Tangan (OTT) within the South Kalimantan Provincial Government. Using a qualitative approach with Robert M. Entman's framing analysis method, this research examines four news articles from two local South Kalimantan media outlets (Tribun Banjarmasin and Radar Banjarmasin) and two national media platforms (Kompas.com and Media Indonesia). The findings reveal significant differences in framing between local and national media. Local media tend to frame the case within a local context, emphasizing direct impacts and practical solutions, while national media view it through a broader lens, focusing on structural issues. These differences highlight the complexity of reporting regional corruption cases and underscore the importance of synergy between local and national media. The results have important implications for understanding the media's role in shaping public perceptions of corruption issues, as well as for developing strategies to eradicate corruption and improve governance in Indonesia. This research also emphasizes the need to strengthen investigative journalism and enhance media literacy among the public.

Keywords: *local media; media framing; national media; regional corruption; sting operation.*

PENDAHULUAN

Kasus korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Salah satu contoh terbaru adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Oktober 2024. OTT tersebut menjerat beberapa pejabat tinggi, termasuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan (Kompas.com, 2024; Media Indonesia, 2024; Radar Banjarmasin, 2024; Tribun Banjarmasin, 2024).

Kasus korupsi di tingkat daerah seperti ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan di Indonesia. Menurut laporan Transparency International (2023), Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia pada tahun 2023 berada di peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34/100. Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Korupsi di tingkat daerah seringkali terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang, lemahnya sistem pengawasan, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah (Muhtar et al., 2018).

Pemberitaan media massa mengenai kasus korupsi memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong upaya pemberantasan korupsi. Cara media membingkai (*framing*) suatu isu dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menyikapi isu tersebut (Strömbäck et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini yang dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap korupsi (Anshori, 2018; Malau, 2023). Dalam konteks ini, analisis *framing* dapat digunakan untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial terkait korupsi melalui pemilihan kata, penekanan isu tertentu, dan cara penyajian berita (Malau, 2023).

Perbedaan *framing* antara media lokal dan nasional dalam memberitakan kasus korupsi daerah menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji perbedaan *framing* media lokal dan nasional dalam berbagai isu. Penelitian mengenai *framing* dalam pemberitaan Pilkada menunjukkan bahwa media lokal dan nasional sering kali memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyajikan berita. Misalnya, penelitian oleh Hasan dan Fathan (2020) menunjukkan bahwa media lokal cenderung lebih fokus pada isu-isu yang relevan dengan komunitas setempat. Sedangkan, media nasional mungkin lebih menekankan pada aspek politik yang lebih luas dan dampaknya terhadap kebijakan nasional. Hal ini sejalan

dengan temuan dari Pinontoan and Wahid (2020), serta Hanief and Ainani (2024), yang mengungkapkan bahwa framing berita dapat berbeda tergantung pada konteks dan tujuan dari masing-masing media (Hanief & Ainani, 2024; Pinontoan & Wahid, 2020). Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus membandingkan *framing* media lokal dan nasional dalam pemberitaan kasus korupsi di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bagaimana media lokal Kalimantan Selatan dan media online nasional membingkai pemberitaan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis akan dilakukan terhadap empat artikel berita dari dua media lokal Kalimantan Selatan (Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin) dan dua media online nasional (Kompas.com dan Media Indonesia) yang memberitakan kasus tersebut.

Tabel 1. Artikel Berita yang Dianalisis

| No. | Judul Artikel | Media | Tanggal Terbit | URL |
|-----|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | Kadis PUPR Kalsel Kenakan Rompi Tahanan, KPK Sita Uang Rp 10 Miliar Lebih | <i>Tribun Banjarmasin</i> | 8 Oktober 2024 | https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/10/08/kadis-pupr-kalsel-kenakan-rompi-tahanan-kpk-sita-uang-rp-10-miliar-lebih |
| 2 | KPK Ungkap Aliran Dana OTT di Dinas PUPR Kalsel, Petaka Fee Proyek, Begini Detailnya | <i>Radar Banjarmasin</i> | 8 Oktober 2024 | https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1975177258/kpk-ungkap-aliran-dana-ott-di-dinas-pupr-kalsel-petaka-fee-proyek-begini-detailnya |
| 3 | OTT di Kalsel Seret Gubernur Sahbirin Noor, Diduga Terima Fee 5 Persen | <i>Kompas.com</i> | 9 Oktober 2024 | https://nasional.kompas.com/read/2024/10/09/06134091/ott-di-kalsel-seret-gubernur-sahbirin-noor-diduga-terima-fee-5-persen?page=all |
| 4 | KPK Dalami Motif Paman Birin | <i>Media Indonesia</i> | 9 Oktober 2024 | https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/707482/kpk- |

| | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|
| | Menerima Rp12,1 Miliar | | | dalami-motif-paman-birin-menerima-rp121-miliar |
|--|------------------------|--|--|--|

Sumber: Data Penelitian, 2024

Analisis *framing* terhadap pemberitaan kasus korupsi penting dilakukan karena dapat mengungkap bagaimana media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu korupsi. Salah satu aspek penting dari *framing* adalah bagaimana media memilih untuk menyoroti elemen tertentu dari kasus korupsi. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Malau, ditemukan bahwa media seperti Kompas.com dan CNN Indonesia menggunakan kata-kata dan bahasa yang spesifik untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai kasus korupsi, dengan menekankan unsur-unsur seperti "korupsi", "pemerintah", dan "keamanan publik" (Malau, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa *framing* dapat digunakan untuk menciptakan kesadaran publik tentang bahaya korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Selain itu, media juga memiliki peran penting dalam pendidikan dan literasi antikorupsi. Meskipun banyak media yang fokus pada pemberitaan kasus korupsi, mereka sering kali kurang memberikan perhatian pada aspek edukasi yang dapat membantu masyarakat memahami dan menghindari tindakan korupsi (Bajari & Wahyudin, 2019). Dalam konteks ini, penting bagi media untuk tidak hanya melaporkan kasus korupsi, tetapi juga untuk memberikan informasi yang mendidik dan membangun sikap antikorupsi di kalangan generasi muda (Bajari & Wahyudin, 2019; Shaliadi & Dannur, 2023).

Pemilihan media lokal dan nasional sebagai objek analisis didasarkan pada asumsi bahwa kedua jenis media tersebut memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda dalam memberitakan kasus korupsi daerah. Media lokal, yang memiliki kedekatan geografis dan emosional dengan daerah yang diberitakan, mungkin memiliki akses informasi yang lebih detail, tetapi juga berpotensi menghadapi dilema dalam menjaga objektivitas pemberitaan. Di sisi lain, media nasional mungkin memiliki sudut pandang yang lebih luas, tetapi kurang detail dalam pemberitaan kasus daerah. Perbedaan ini dapat memengaruhi bagaimana kedua jenis media tersebut membingkai pemberitaan kasus korupsi daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam kajian jurnalisme dan komunikasi politik. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana media lokal dan nasional membingkai isu-isu sensitif seperti korupsi di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Strömbäck et al. (2022) yang menekankan pentingnya memahami peran media dalam membentuk diskursus publik tentang

isu-isu politik dan pemerintahan (Strömbäck et al., 2022).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktisi media dalam meningkatkan kualitas dan objektivitas pemberitaan kasus korupsi. Selain itu, temuan penelitian juga dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci. Pertama, bagaimana media lokal Kalimantan Selatan membingkai pemberitaan OTT KPK di Pemprov Kalimantan Selatan? Kedua, bagaimana media online nasional membingkai pemberitaan yang sama? Ketiga, apa perbedaan dan persamaan *framing* antara media lokal dan nasional dalam pemberitaan kasus tersebut? Melalui analisis *framing* komparatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana media lokal dan nasional memainkan perannya dalam memberitakan kasus korupsi daerah, serta implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert M. Entman. Penggunaan model Entman dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk mengungkap bagaimana media membangun realitas melalui pemilihan dan penekanan aspek-aspek tertentu dari suatu isu. *Framing* tidak hanya terkait dengan apa yang diberitakan, tetapi juga bagaimana suatu isu dipresentasikan (Scheufele & Tewksbury, 2007). Model ini berfokus pada empat elemen utama: pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan sumber masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*).

Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell & Poth, 2016). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana media membingkai pemberitaan kasus korupsi.

Objek penelitian ini adalah artikel berita tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dimuat di empat media online: dua media lokal Kalimantan Selatan (Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin) dan dua media nasional (Kompas.com dan Media Indonesia). Pemilihan media ini didasarkan pada

pertimbangan keterwakilan perspektif lokal dan nasional, serta tingkat popularitas media tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi artikel berita yang terbit pada periode 8 – 9 Oktober 2024, yaitu periode awal pemberitaan kasus tersebut. Pemilihan periode ini didasarkan pada asumsi bahwa *framing* media pada awal pemberitaan suatu kasus cenderung lebih kuat dan berpengaruh dalam membentuk opini public (Lecheler, 2019).

Analisis data dilakukan dengan mengawalinya dengan membaca keseluruhan artikel untuk memperoleh gambaran umum mengenai isi dari artikel tersebut. Setelah mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi unit analisis berupa kalimat atau paragraf yang relevan dengan empat elemen *framing* Entman. Unit analisis yang telah diidentifikasi kemudian dikategorikan ke dalam empat elemen *framing* Entman untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Setelah pengkategorian selesai dilakukan, interpretasi makna dari setiap elemen *framing* dilakukan untuk memahami bagaimana masing-masing media membingkai pemberitaan terkait kasus OTT tersebut. Langkah terakhir dalam analisis data adalah membandingkan *framing* antara media lokal dan nasional untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam pembedaan berita di kedua jenis media.

Untuk memastikan kredibilitas penelitian, peneliti menerapkan beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber data dengan menggunakan multiple media outlets. Kedua, *peer debriefing* dengan melibatkan peneliti lain untuk meninjau dan mengkritisi proses penelitian. Ketiga, member *checking* dengan mengkonfirmasi interpretasi peneliti kepada pihak media yang diteliti (Lincoln, 1985; Tracy, 2024).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis hanya dilakukan pada empat media *online*, sehingga mungkin tidak merepresentasikan keseluruhan lanskap media di Indonesia. Kedua, periode pengambilan data yang singkat mungkin tidak menangkap dinamika *framing* media dalam jangka panjang. Namun, keterbatasan ini dapat menjadi peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana media lokal dan nasional membingkai isu korupsi daerah. Pemahaman ini penting tidak hanya bagi kajian jurnalisme dan komunikasi politik, tetapi juga bagi upaya peningkatan kualitas pemberitaan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *framing* terhadap pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada empat media online (Tribun Banjarmasin, Radar Banjarmasin, Kompas.com, dan Media Indonesia) menghasilkan temuan yang menarik. Hasil analisis ini didasarkan pada empat elemen *framing* Entman: pendefinisian masalah, memperkirakan sumber masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian.

Dalam pendefinisian masalah, terlihat perbedaan yang signifikan antara media lokal dan nasional. Media lokal, yaitu Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin, cenderung mendefinisikan masalah sebagai kasus suap dalam proyek infrastruktur dan praktik korupsi sistematis di pemerintahan daerah. Tribun Banjarmasin, misalnya, menulis: "KPK menyita uang lebih dari Rp 10 miliar dari OTT terhadap Kadis PUPR Kalsel terkait dugaan suap proyek infrastruktur." Sementara itu, Radar Banjarmasin menekankan aspek sistematis dari korupsi tersebut: "OTT di Dinas PUPR Kalsel mengungkap aliran dana dan praktik fee proyek yang telah berlangsung lama."

Di sisi lain, media nasional seperti Kompas.com dan Media Indonesia cenderung mendefinisikan masalah dengan menekankan keterlibatan pejabat tinggi. Kompas.com menulis: "OTT KPK di Kalsel menyeret Gubernur Sahbirin Noor, menunjukkan keterlibatan langsung pejabat tinggi daerah dalam praktik korupsi." Media Indonesia bahkan lebih eksplisit dalam menyoroti peran kepala daerah: "Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam pengelolaan anggaran dan proyek."

Tabel 2. Pendefinisian Masalah pada Keempat Media

| Media | Pendefinisian Masalah |
|---------------------------|---|
| <i>Tribun Banjarmasin</i> | Kasus suap dalam proyek infrastruktur |
| <i>Radar Banjarmasin</i> | Praktik korupsi sistematis di pemerintahan daerah |
| <i>Kompas.com</i> | Keterlibatan pejabat tinggi dalam korupsi daerah |
| <i>Media Indonesia</i> | Penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah |

Sumber: Hasil Analisis data, 2024

Perbedaan pendefinisian masalah ini sejalan dengan temuan (Reinemann et al., 2021) yang menunjukkan bahwa media lokal dan nasional seringkali memiliki sudut pandang berbeda dalam membingkai isu-isu politik dan pemerintahan. Media lokal cenderung berfokus pada dampak langsung terhadap masyarakat setempat, sementara media nasional lebih menekankan implikasi politik yang lebih luas.

Dalam memperkirakan sumber masalah, perbedaan antara media lokal dan nasional juga terlihat jelas. Media lokal cenderung melihat sumber masalah pada aspek-aspek praktis dan kultural. *Tribun Banjarmasin*, misalnya, menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek sebagai akar masalah, sementara *Radar Banjarmasin* lebih menekankan pada budaya korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Media nasional, sebaliknya, cenderung melihat sumber masalah dari perspektif yang lebih luas dan struktural. *Kompas.com* menekankan kurangnya integritas pejabat publik, sementara *Media Indonesia* mengaitkan kasus ini dengan sistem politik yang lebih luas yang masih memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit daerah. Perbedaan sudut pandang ini mencerminkan apa yang disebut oleh (Scheufele & Tewksbury, 2007) sebagai "frame building", di mana media membangun *frame* berdasarkan berbagai faktor, termasuk orientasi ideologis, rutinitas organisasi, dan pengaruh eksternal.

Dalam aspek keputusan moral, keempat media menunjukkan kesamaan dalam mengutuk praktik korupsi, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Media lokal cenderung menekankan dampak korupsi terhadap pembangunan daerah dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Media nasional, di sisi lain, lebih menyoroti dampak korupsi terhadap citra pemerintahan dan sistem demokrasi secara lebih luas.

Tabel 3. Keputusan Moral pada Keempat Media

| Media | Keputusan Moral |
|---------------------------|---|
| <i>Tribun Banjarmasin</i> | Korupsi merugikan pembangunan daerah |
| <i>Radar Banjarmasin</i> | Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat |
| <i>Kompas.com</i> | Korupsi pejabat tinggi mencoreng citra pemerintahan |
| <i>Media Indonesia</i> | Korupsi sistemik merusak demokrasi dan tata kelola pemerintahan |

Sumber: Hasil Analisis Data, 2024

Perbedaan penekanan dalam keputusan moral ini mencerminkan apa yang disebut oleh (Entman, 1993) sebagai "salience", di mana media membuat beberapa aspek dari realitas yang dirasakan menjadi lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan. Hal ini juga sejalan dengan temuan (Malau, 2023) yang menunjukkan bahwa *framing* media dalam pemberitaan korupsi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap *urgensi* dan dampak dari tindak korupsi.

Dalam menekankan penyelesaian, media lokal dan nasional juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Media lokal cenderung menekankan solusi-solusi praktis seperti penguatan sistem pengawasan dan reformasi birokrasi. Sementara itu, media nasional lebih menekankan pada penegakan hukum yang tegas dan reformasi sistem politik yang lebih luas.

Perbedaan penekanan penyelesaian ini mencerminkan apa yang disebut oleh (Strömbäck et al., 2022) sebagai "solution framing", di mana media tidak hanya menyajikan masalah, tetapi juga memberikan pandangan tentang solusi yang dianggap tepat. Media yang kritis dapat membantu menciptakan ruang bagi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan suara masyarakat dengan pengambil keputusan. Dengan melaporkan isu-isu yang relevan dan memberikan platform bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka, media dapat memperkuat partisipasi demokratis dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Ayomi et al., 2023; Badr et al., 2022).

Secara keseluruhan, analisis *framing* ini mengungkapkan bagaimana media lokal dan nasional memiliki perspektif yang berbeda dalam membongkar kasus korupsi daerah. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan fokus dan kepentingan antara media lokal dan nasional, tetapi juga menunjukkan kompleksitas dalam pemberitaan isu-isu korupsi di Indonesia. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu korupsi dan upaya pemberantasannya.

Analisis *framing* terhadap pemberitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan perbedaan signifikan antara cara media lokal dan nasional membongkar kasus tersebut. Perbedaan ini terlihat jelas dalam keempat elemen *framing* Entman: pendefinisian masalah, perkiraan sumber masalah, keputusan moral, dan penekanan penyelesaian.

Media lokal seperti Tribun Banjarmasin dan Radar Banjarmasin cenderung membongkar kasus dalam konteks lokal, menekankan dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Kalimantan Selatan. Sebaliknya, media nasional seperti Kompas.com dan Media Indonesia melihat kasus dalam konteks yang lebih luas, mengaitkannya dengan isu-isu

nasional seperti sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Perbedaan ini sejalan dengan temuan Nielsen (2015) dan mencerminkan "hierarchy of influences" yang dikemukakan oleh Shoemaker & Reese (2013).

Dalam hal kedalaman dan keluasan pemberitaan, media lokal cenderung memberikan informasi yang lebih detail tentang kasus, termasuk proyek-proyek yang terlibat dan aliran dana. Hal ini mungkin disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber lokal. Media nasional, di sisi lain, memberikan pemberitaan yang lebih luas, mengaitkan kasus dengan tren korupsi di daerah secara umum dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan nasional. Perbedaan ini mencerminkan "cascading network activation" yang dijelaskan oleh (Entman et al., 2009).

Dalam memperkirakan sumber masalah dan menekankan penyelesaian, media lokal cenderung berfokus pada aspek-aspek praktis seperti lemahnya pengawasan dan perlunya reformasi birokrasi. Media nasional lebih cenderung melihat persoalan struktural seperti sistem politik yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Perbedaan ini sejalan dengan temuan Reinemann et al., (2012) tentang "interpretive frameworks" yang berbeda antara media lokal dan nasional (Reinemann et al., 2012).

Perbedaan framing ini berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kasus korupsi dan upaya penanganannya. Sesuai dengan teori agenda-setting dan *framing*, cara media membingkai isu dapat memengaruhi pemahaman dan sikap publik. *Framing* media lokal yang lebih fokus pada dampak langsung mungkin akan mendorong tuntutan perbaikan segera dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sementara, *framing* media nasional yang menekankan aspek struktural dapat mendorong diskusi publik yang lebih luas tentang reformasi sistem politik dan pemberantasan korupsi di tingkat nasional.

Analisis ini juga mengungkapkan tantangan etis dalam pemberitaan kasus korupsi. Media lokal mungkin menghadapi dilema dalam menjaga objektivitas, sementara media nasional mungkin kesulitan menyajikan kompleksitas kasus lokal tanpa oversimplifikasi. Sesuai pandangan Ward (2018), jurnalisme etis harus menyeimbangkan kewajiban menginformasikan publik dengan potensi dampak pemberitaan terhadap proses hukum dan reputasi pihak-pihak yang terlibat (Ward, 2018).

Perbedaan *framing* juga merefleksikan peran berbeda yang dimainkan media lokal dan nasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Media lokal dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat lokal, sementara media nasional dapat membentuk agenda nasional terkait pemberantasan korupsi. Namun, efektivitas peran media ini bergantung

pada faktor-faktor seperti kebebasan pers, literasi media masyarakat, dan responsivitas pemerintah.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan media dan upaya pemberantasan korupsi. Diperlukan sinergi antara media lokal dan nasional, penguatan jurnalisme investigatif, peningkatan literasi media masyarakat, dan reformasi kebijakan antikorupsi, terutama di tingkat daerah. Dengan demikian, media dapat memainkan peran lebih efektif dalam mendorong good governance dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perbedaan *framing* antara media lokal dan nasional dalam pemberitaan kasus OTT KPK di Pemprov Kalimantan Selatan juga memiliki implikasi penting terhadap persepsi dan partisipasi publik dalam isu korupsi. Sebagaimana diungkapkan oleh (Strömbäck et al., 2022), *framing* media dapat memengaruhi partisipasi politik masyarakat, baik secara *online* maupun *offline*. Dalam konteks ini, *framing* yang berbeda antara media lokal dan nasional berpotensi menghasilkan respons publik yang beragam, baik dalam hal sikap maupun tindakan terkait isu korupsi.

Aspek etika jurnalistik dalam pemberitaan kasus korupsi juga menjadi sorotan penting dalam analisis ini. Media lokal, dengan kedekatannya pada konteks dan aktor lokal, mungkin menghadapi dilema dalam menjaga objektivitas pemberitaan. Di sisi lain, media nasional mungkin menghadapi tantangan dalam menyajikan kompleksitas kasus lokal tanpa melakukan oversimplifikasi. Sebagaimana ditekankan oleh Ward (2018), jurnalisme etis dalam pemberitaan korupsi harus mampu menyeimbangkan antara kewajiban untuk menginformasikan publik dan potensi dampak pemberitaan terhadap proses hukum serta reputasi pihak-pihak yang terlibat.

Analisis terhadap penggunaan bahasa dalam pemberitaan menunjukkan bahwa keempat media cenderung menggunakan bahasa yang hati-hati, dengan menggunakan kata-kata seperti "diduga", "terindikasi", dan "disangka". Hal ini mencerminkan upaya media untuk menjaga asas praduga tak bersalah, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia (Kode Etik Jurnalistik, 2018). Penggunaan bahasa yang hati-hati ini menunjukkan adanya kesadaran etis dalam pemberitaan kasus korupsi, meskipun tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan antara kewajiban menginformasikan publik dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Peran media dalam pemberantasan korupsi juga tergambar jelas melalui perbedaan *framing* ini. Media lokal, dengan pemberitaannya yang lebih detail dan kontekstual, berpotensi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan mendorong partisipasi

publik dalam pengawasan pemerintahan daerah. Sementara itu, media nasional, dengan perspektifnya yang lebih luas, dapat berperan dalam membentuk agenda nasional terkait pemberantasan korupsi dan mendorong reformasi sistemik. Hal ini sejalan dengan pandangan Coronel (2010) yang menekankan peran penting media dalam mempromosikan *good governance* dan memberantas korupsi (Coronel, 2010).

Namun, efektivitas peran media dalam pemberantasan korupsi tidak berdiri sendiri. Ia bergantung pada berbagai faktor seperti kebebasan pers, literasi media masyarakat, dan responsivitas pemerintah terhadap pemberitaan media. Dalam beberapa kasus, media mungkin terpaksa mengubah atau membatasi pemberitaan mereka terkait isu-isu sensitif, termasuk korupsi, akibat tekanan dari pihak-pihak tertentu (Ikhwan et al., 2017; Suyanto, 2018). Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjaga integritas dan independensinya agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut, perbedaan framing antara media lokal dan nasional dalam pemberitaan kasus OTT KPK di Pemprov Kalimantan Selatan juga mencerminkan kompleksitas lanskap media di Indonesia. Keberagaman perspektif ini, di satu sisi, dapat dilihat sebagai kekayaan informasi yang memungkinkan publik untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang suatu isu. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam membentuk pemahaman publik yang koheren tentang isu korupsi dan upaya penanganannya.

Dalam konteks ini, peran literasi media menjadi semakin krusial. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk menganalisis dan menginterpretasi berbagai sudut pandang yang disajikan oleh media yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Mihailidis & Thevenin (2013) yang menekankan pentingnya pendidikan literasi media dalam membangun masyarakat yang kritis dan partisipatif. Dengan kemampuan literasi media yang baik, publik dapat lebih baik dalam memahami kompleksitas isu korupsi dan berpartisipasi secara lebih efektif dalam upaya pengawasan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu, perbedaan *framing* antara media lokal dan nasional juga menunjukkan adanya ketegangan antara perspektif lokal dan nasional dalam memahami dan menangani isu korupsi. Media lokal, dengan fokusnya pada dampak langsung dan konteks spesifik daerah, memiliki potensi untuk memobilisasi aksi lokal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu, media nasional, dengan perspektifnya yang lebih luas, dapat mendorong perubahan sistemik dan reformasi kebijakan di tingkat nasional. Keduanya memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Namun, perbedaan ini juga dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi upaya

antikorupsi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Klitgaard et al., (2000) strategi antikorupsi yang efektif membutuhkan sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini, media dapat memainkan peran penting sebagai jembatan antara perspektif lokal dan nasional, memfasilitasi dialog dan pemahaman bersama tentang kompleksitas isu korupsi dan strategi penanganannya.

Lebih jauh lagi, temuan penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih nuansir dalam memahami peran media dalam pemberantasan korupsi. Tidak cukup hanya melihat media sebagai entitas tunggal, tetapi perlu memahami keragaman peran dan perspektif yang dibawa oleh media yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pandangan Waisbord (2000) yang menekankan pentingnya memahami dinamika internal media dan interaksinya dengan berbagai kekuatan sosial-politik dalam konteks pemberitaan korupsi.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman geografis dan sosial-budaya yang tinggi, pemahaman terhadap nuansa pemberitaan media lokal dan nasional menjadi semakin penting. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi komunikasi antikorupsi yang lebih efektif dan responsif terhadap konteks lokal, sambil tetap mempertahankan koherensi dengan agenda nasional.

Akhirnya, penelitian ini juga membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana dinamika media lokal dan nasional berperan dalam membentuk wacana publik tentang isu-isu penting lainnya di Indonesia. Pemahaman yang lebih mendalam tentang hal ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan media, strategi komunikasi publik, dan upaya penguatan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, analisis framing terhadap pemberitaan kasus OTT KPK di Pemrov Kalimantan Selatan tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana isu korupsi dibingkai oleh media yang berbeda, tetapi juga membuka diskusi yang lebih luas tentang peran media dalam tata kelola pemerintahan, partisipasi publik, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun penelitian ini telah berupaya memberikan analisis yang komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Salah satu keterbatasan utama adalah jumlah media yang dianalisis. Penelitian ini hanya menganalisis empat media online, yang mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan *landscape* media di Indonesia. Hal ini membuka peluang bagi penelitian masa depan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak media, termasuk media cetak dan penyiaran, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Selain itu, periode analisis yang relatif singkat menjadi keterbatasan lain dalam penelitian ini. Analisis hanya dilakukan pada pemberitaan awal kasus (8 – 9 Oktober 2024), sehingga mungkin tidak menangkap dinamika framing dalam jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, penelitian lanjutan dapat mengadopsi pendekatan *longitudinal* untuk melihat bagaimana framing berubah seiring perkembangan kasus, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang evolusi narasi media seiring waktu.

Fokus penelitian yang terbatas pada teks berita juga menjadi salah satu keterbatasan. Penelitian ini tidak mempertimbangkan elemen visual seperti foto atau infografis, yang bisa jadi memiliki peran penting dalam pbingkaiian berita. Oleh karena itu, penelitian masa depan dapat mengadopsi pendekatan multimodal untuk menganalisis bagaimana elemen visual berkontribusi pada *framing* berita, memperkaya pemahaman kita tentang strategi pbingkaiian media yang lebih komprehensif.

Keterbatasan lain yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya analisis resepsi *audiens*. Penelitian ini tidak mengkaji bagaimana *audiens* menerima dan memaknai *framing* media, yang sebenarnya bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas *framing* media dalam membentuk opini publik. Studi resepsi *audiens* di masa depan dapat mengisi kesenjangan ini, memberikan wawasan berharga tentang dampak nyata *framing* media terhadap persepsi publik.

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, beberapa arah penelitian masa depan dapat dipertimbangkan. Pertama, studi komparatif yang lebih luas, melibatkan lebih banyak media dari berbagai *platform*, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang *landscape framing* media di Indonesia. Kedua, analisis *longitudinal* dapat dilakukan untuk melihat evolusi framing sepanjang perkembangan kasus, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika *framing* media seiring waktu.

Selain itu, analisis *framing* multimodal yang mempertimbangkan elemen visual dalam pemberitaan dapat memperkaya pemahaman kita tentang strategi pbingkaiian media yang lebih komprehensif. Studi resepsi audiens juga penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana publik memaknai framing media, memberikan wawasan tentang efektivitas strategi *framing* dalam membentuk opini publik.

Terakhir, penelitian lintas kasus dapat dilakukan untuk melihat apakah pola *framing* yang ditemukan dalam kasus ini juga berlaku untuk kasus-kasus korupsi daerah lainnya. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola umum dalam pbingkaiian kasus

korupsi oleh media di Indonesia, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran media dalam isu-isu korupsi di tingkat daerah.

SIMPULAN

Analisis *framing* terhadap pemberitaan OTT KPK di Pemrov Kalimantan Selatan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara *framing* media lokal dan nasional. Media lokal cenderung membingkai kasus dalam konteks lokal dengan penekanan pada dampak langsung dan solusi praktis, sementara media nasional cenderung melihatnya dalam konteks yang lebih luas dengan penekanan pada isu-isu struktural. Perbedaan *framing* ini mencerminkan kompleksitas dalam pemberitaan kasus korupsi daerah dan menunjukkan pentingnya sinergi antara media lokal dan nasional untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada publik. Temuan penelitian juga menyoroti tantangan etis dalam pemberitaan korupsi dan pentingnya penguatan jurnalisme investigatif serta peningkatan literasi media di kalangan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini meliputi perlunya reformasi kebijakan media dan antikorupsi, serta pentingnya peran media dalam mendorong *good governance* dan pemberantasan korupsi. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang peran media dalam membingkai isu-isu korupsi daerah dan membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Anshori, D. S. (2018). Stigma negatif bahasa korupsi dalam pemberitaan media massa. *Litera*, 17(2).
- Ayomi, P. N., Candra, K. D. P., & Sulatra, I. K. (2023). Speech act and experiential analysis of Bali Netizen reactions to the pandemic regulation posts. *Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies*, 12(2), 86–92.
- Badr, A., Mohamed, T. I., Osman, N. A. Q., & Mikhaylov, A. (2022). A review of social media website users' interaction paths with governmental accounts during the COVID-19 pandemic. *Informatics*, 9, 50.
- Bajari, A., & Wahyudin, U. (2019). Pemanfaatan mading dan website dalam membentuk sikap antikorupsi siswa di kota Kupang. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 59–72.
- Coronel, S. (2010). Corruption and the watchdog role of the news media. *Public Sentinel: News Media and Governance Reform*, 111–136.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Entman, R. M., Matthes, J., & Pellicano, L. (2009). Nature, sources, and effects of news framing. In *The handbook of journalism studies* (pp. 195–210). Routledge.
- Hanief, L., & Ainani, M. (2024). Framing Analysis of Israel-Palestine Conflict News on Online Media Detik.com and Republika.co.id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 8(1), 86–98. <https://doi.org/10.24198/jkj.v8i1.53602>
- Hasan, I., & Fathan, F. (2020). *Analisis Framing Berita Politik Menjelang Pilkada Klaten Tahun 2020 pada Solopos. com*.
- Ikhwan, A. N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2017). The Influence of Accountability on Clean-corruption Perception in Local Government. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 5(2), 129–146.
- Klitgaard, R. E., Abaroa, R. M., & Parris, H. L. (2000). *Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention*. World Bank Publications.
- Kode Etik Jurnalistik, 1 (2018). www.dewanpers.or.id
- Lecheler, S. (2019). *Framing Effects in Political Communication*. <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756223/obo-9780199756223-0269.xml>
- Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry* (Vol. 75). sage.
- Malau, R. M. U. (2023). Komodifikasi Kasus Korupsi; Framing Media Operasi Penangkapan Wali Kota Bandung oleh Kompas. com dan CNN. Indonesia. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 175–181.
- Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media literacy as a core competency for engaged citizenship in participatory democracy. *American Behavioral Scientist*, 57(11), 1611–1622.
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552.
- Nielsen, R. K. (2015). *Local journalism: The decline of newspapers and the rise of digital media*. Bloomsbury Publishing.
- Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas. Com Dan Jawapos. Com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24.
- Reinemann, C., Stanyer, J., Scherr, S., & Legnante, G. (2012). Hard and soft news: A review of concepts, operationalizations and key findings. *Journalism*, 13(2), 221–239.
- Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. *Journal of Communication*, 57(1), 9–20.
- Shaliadi, I., & Dannur, M. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. *Anayasa: Journal of Legal Studies*, 1(1 Juli), 15–22.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2013). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective*. Routledge.
- Strömbäck, J., Falasca, K., & Kruikeimer, S. (2022). The mix of media use matters: Investigating the effects of individual news repertoires on offline and online political participation. *Political Communication*, 35(3), 413–432.

- Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 39–67.
- Tracy, S. J. (2024). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. John Wiley & Sons.
- Waisbord, S. (2000). *Watchdog journalism in South America—News, accountability, and democracy*. Columbia University Press.
- Ward, S. J. A. (2018). *Ethical journalism in a populist age: The democratically engaged journalist*. Rowman & Littlefield.